

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi *Kebijakan E-Government* dalam Pengelolaan Sistem Informasi Barang Pokok dan Barang Penting melalui Aplikasi Barang Pokok dan Barang Penting di Kabupaten Bandung dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran dan tujuan peneliti dalam Implementasi *Kebijakan E-Government* Melalui Aplikasi Sibapokting Di Kabupaten Bandung bahwa berdasarkan Tujuan yaitu kesesuaian Kebijakan (Program) Pemerintah Kabupaten Bandung sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan dan Perindustrian menggunakan *E-Government* dalam pengelolaan sistem informasi barang pokok dan barang penting, Penggunaan ini mempermudah masyarakat dalam mengecek langsung harga pangann melalui gadget. Namun kebijakan ini masih kurang intesif dalam penyampaian aturan kebijakan kepada warga masyarakat. hal ini berdasarkan observasi peneliti ke lapangan dimana beberapa wilayah warga masyarakat tidak mengetahui kebijakan ini. Sedangkan untuk Ukuran yaitu Ketetapan sasaran peneliti menilai bahwa masih kurang dalam Implementasi kebijakan ini karena belum seluruhnya tepat sasaran melihat bahwa masyarakat belum mengetahui kebijakan ini karena dari proses sosialisasi edukasi yang kurang dan beberapa masyarakat di beberapa kewilayahan yang belum memahami Teknologi Informasi

seperti aplikasi maupun website yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bandung Sehingga diperlukan pembuatan kebijakan yang dapat melihat kondisi sosio dan kultur budaya di tingkat para pelaksana kebijakan yaitu Aparatur dan masyarakat.

2. Sumber daya peneliti menilai bahwa mengalami kekurangan pada sumber daya manusia dan Sumber Daya Anggaran, untuk sumber daya manusia ini peneliti melihat sumber daya manusia kurang dalam sebuah kebijakan, dikarenakan Tidak adanya relawan dari warga yang bersedia mengurus bank sampah, tidak ada nya honor dan tidak adanya sosialisasi secara berkala oleh Dinas terkait hal ini membuat beberapa bank sampah tidak aktif dikarenakan terjadinya kendala tersebut mengalami ketidaksesuaian keahlian pada masing-masing individu dan tidak adanya sumber daya manusia yang berjiwa sosial. . jika salah satu sumber daya tidak berjalan maka implementasi kebijakan tersebut tidak dapat berhasil dalam pelaksanaannya.
3. Komunikasi antar organisasi peneliti menilai Transmisi kejelasan dan konsistensi berjalan kurang maksimal dalam komunikasi dan penyampaian informasi. Hal ini dilihat dari hanya beberapa aparatur kewilayahan 159 melakukan penyampaian kebijakan ini kepada warga masyarakatnya dan aparatur kewilayahan dibawahnya yang hanya beberapa yang peduli akan kebijakan ini
4. Karakteristik Organisasi Pelaksana peneliti menilai bahwa pendidikan cukup bagus dan dalam hal kejujuran aparatur dan petugas Sistem Informasi

Barang Pokok dan Barang Penting sudah melakukan di dalam melaksanakan kebijakan.

5. Sikap Para Pelaksana peneliti menilai bahwa dalam indikator ini yaitu kognisi (pemahaman) para aparatur, tanggapan dan Intensitas dalam memahami isi kebijakan masih ada beberapa kekurangan, hal itu dilihat dari beberapa kewilayahan sudah menjalankannya dan ada beberapa kewilayahan yang masih belum ada pergerakan.
6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik peneliti menilai beberapa sub indikator ini yaitu sumber daya ekonomi dan Kekuasaan, Sumber daya ekonomi yaitu anggaran untuk memenuhi kebutuhan kebijakan sangatlah kurang. Hal ini disebabkan tidak dianggarkannya anggaran untuk kebijakan yang berfokus pada masalah lingkungan. Selanjutnya, Indikator Kekuasaan yaitu kewenangan pejabat aparatur dinilai masih kurang dikarenakan dalam kekuasaannya hanya sebatas perintah saja dan sedikit turun ke lapangan untuk menanyakan kepada petugas yang ada di lapangan, hal tersebut Terkait permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di lapangan dan kebutuhan apa yang mereka butuhkan itu masih menjadi kekurangan yang ada di pejabat aparatur.

5.2 Saran

Adapun Saran yang Peneliti sampaikan mengenai Implementasi kebijakan *E-Government* melalui aplikasi Sistem Informasi Barang Pokok dan Barang Penting di Kabupaten Bandung di Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan kesimpulan diatas adalah:

1. Kabupaten Bandung dalam Ketetapan sasaran Implementasi Kebijakan *E-Government* dalam Pengelolaan Sistem Informasi Barang Pokok dan Barang Penting (Sibapokting) mengalami ketidaktepatan sasaran dalam sebuah kebijakan, Hal ini diperlukan pembuatan kebijakan Sibapokting oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kebijakan yang operasional yang dapat melihat kondisi sosio dan kultur budaya di tingkat para pelaksana kebijakan yaitu Aparatur dan masyarakat.
2. Sumber Daya yang terdiri dari Sumber Daya Manusia yang meliputi aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada masyarakat, Soreang, Ciwidey, Baleendah, Cileunyi, Banjaran, Sayati, BaruMajalaya, Saya Majalaya, Cicalengka selama ini menjadi pondasi mengalami kekurangan dan ketidaksesuaian keahlian pada masing-masing individu, Hal ini diperlukan pelatihan dan edukasi lebih lagi agar sumber daya manusia dapat memahami dan dapat menjalankan aplikasi. Untuk Sumber Daya anggaran dalam kebijakan Sibapokting ini agar diperhatikan dan disesuaikan anggarannya agar dapat membiayai segala keperluan Kebijakan Aplikasi Sibapokting.
3. Komunikasi Antar Organisasi dalam Implementasi kebijakan *E-Government* Sibapokting harus adanya penyelarasan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar kebijakan tidak ada perubahan dan mekanisme pada kebijakan aplikasi ini dapat berjalan.
4. Sikap Para Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* yaitu kognisi (pemahaman) para aparatur, tanggapan dan Intensitas harus lebih dipahami lagi isi kebijakan aplikasi ini agar tidak terjadi perbedaan dalam

pemahaman dan pengimplementasian Hal ini diperlukan komunikasi dan edukasi kepada aparaturnya kewilayahan dan masyarakat sebagai objek Implementasi Kebijakan ini.

5. Kondisi Ekonomi, yaitu anggaran untuk memenuhi kebutuhan saat ini masih kurang ini perlu ada komitmen anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Bandung yang harus diperhatikan pasalnya anggaran ini sangat penting untuk membiayai segala kebutuhan yang ada di dalam kebijakan ini. Sedangkan untuk kondisi politik yaitu kekuasaan lebih diperhatikan kewenangan pejabat aparaturnya harus seimbang dalam memberikan arahan dan melakukan pemantauan ke lapangan, hal ini perlu dilakukan agar tercapainya tujuan yang ada didalam Implementasi Kebijakan aplikasi Sibapokting.